Volume 7 Number 2 2008

# **Evaluasi Satu Tahun Penerapan** Kebijakan Moneter Berdasarkan Inflation Targeting di Indonesia

# **Wawan Dhewanto** Rindawati Maulina

Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung

# 1. Latar Belakang

Inflation Targeting Framework (ITF) tengah menjadi isu yang hangat dan bahkan telah dijadikan jargon dalam penetapan kebijakan moneter bagi beberapa negara di dunia karena keberhasilan yang telah dicetaknya dalam menekan laju inflasi. Dipelopori oleh Selandia Baru, beberapa negara maju seperti Inggris, Kanada, Swedia, Finlandia, Spanyol, Australia dan Israel mengikuti langkah negara ini untuk menerapkan IT (Inflation Targeting). Setelah itu, beberapa negara berkembang seperti Republik Ceko, Chili, Brazil, Korea, Thailand dan Filipina turut pula mengadopsi ITF agar dapat memperbaiki dan memperkuat fundamental ekonomi makro negaranya.

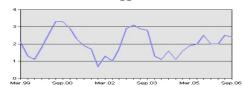
Sebuah studi yang dilakukan oleh Corbo et. al. (2001)(1) melaporkan bahwa pada beberapa negara berkembang yang telah mengadopsi ITF, tingkat inflasi secara signifikan memperlihatkan level yang rendah serupa dengan apa yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi pada negara maju yang telah terlebih dahulu mengadopsi ITF. Gambar berikut memperlihatkan grafik laju inflasi sejak tahun 2000 hingga tahun 2006 pada beberapa negara yang telah mengadopsi inflation targeting, seperti Inggris, Kanada, Korea, Thailand dan Philipina.

1) Corbo, V., O. Landerretche and Schmidt Hebbel (2001), "Does Inflation Targeting Make a Difference?" in N. Loayza and R. Soto (eds), Ten Years of Inflation Targeting: Design, Performance, Challenges,

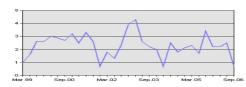
Jurnal Manajemen Teknologi

Evaluasi Satu Tahun Penerapan Kebijakan Moneter Berdasarkan Inflation Targeting di Indonesia

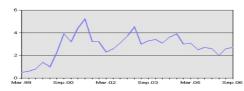
#### Inggris



# Kanada



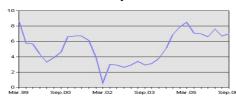
# Korea Selatan



# Thailand



# **Filipina**



Gambar 1. Grafik Laju Inflasi Inggris, Kanada, Korsel, Thailand & Filipina 2000 2006 (2)

Pada Gambar 1 terlihat negara-negara tersebut berhasil membawa tingkat inflasinya ke dalam angka satu digit setiap tahunnya setelah menerapkan inflation targeting. Dengan keberhasilan ini, bank sentral negara-negara tersebut memiliki kredibilitas yang meningkat sepanjang waktu sehingga dengan ITF dipercaya akan dapat mengurangi variasi baik dari sisi inflasi maupun output (Cecchetti dan Ehrmann 1999)(3). Namun dipihak lain, banyak yang berargumen bahwa pengadopsian ITF akan mengorbankan pertumbuhan output suatu negara, khususnya bagi negara berkembang yang masih memberi perhatian

<sup>2)</sup> Website Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/Data+Statistik 3) Cecchetti, Stephen G., and Michael Ehrmann (1999), "Does Inflation Targeting Increase Output Volatility?" An International Comparison of Policymakers' Preferences and Outcomes'. NBER Working Paper No. W7426. Cambridge MA

besar pada pertumbuhan yang cepat untuk men-*generate* berbagai hal yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

Sukses tidaknya ITF sangat tergantung pada kemampuan terpenuhinya prasyarat yang mau tidak mau harus mendukung terlaksananya kebijakan ini. Salah satu prasyarat tersebut adalah tingkat independensi bank sentral di negara yang menerapkan ITF. Dalam upaya pemulihan sektor keuangan di Indonesia pasca krisis moneter, telah dilakukan restrukturisasi sistem moneter sejak tahun 1998. Bentuk nyata restrukturisasi dilakukan dengan cara menyehatkan bank dan memberikan independensi kepada Bank Sentral. Dengan adanya independensi dalam menentukan kebijakan, maka peluang tercapainya sasaran akan lebih maksimal.

# Indonesia

Gambar 2. Grafik Laju Inflasi Indonesia 2000-2006 (4)

Pada Gambar 2 dapat dilihat *inflation rate* di Indonesia yang cenderung belum membaik dan masih mencatat laju inflasi dua digit sejak krisis 1998. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia memutuskan untuk turut mengadopsi *Inflation Targeting Framework* yang diyakini akan mampu menekan laju inflasi di masa depan. Perilaku inflasi di Indonesia selama ini terutama disebabkan oleh faktor peningkatan harga barang-barang dan jasa, yang nilainya ditentukan oleh pemerintah, BUMN, swasta, atau oleh kartel seperti Pertamina (BBM), PLN (listrik), Telkom (telepon), PAM (air), dan sebagainya. Untuk itu sudah seharusnya tugas pengendalian inflasi ini bukan hanya menjadi tugas Bank Indonesia saja namun juga dituntut peran pemerintah bersama unit-unit usahanya agar berupaya mengerem lonjakan harga yang bisa memicu peningkatan inflasi. Dan yang tidak kalah penting, masyarakat harus turut diajak berpartisipasi, paling tidak untuk mampu memahami besarnya arti memerangi inflasi bagi kehidupan mereka sehari-hari.

#### 2. Tujuan Penelitian

Sejak Juli 2005 Bank Indonesia telah memutuskan untuk mengadopsi ITF dalam kebijakan moneternya dalam rangka mencapai tujuannya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. BI selalu berusaha maksimal dalam menjaga nilai tukar rupiah agar tidak turun akibat lonjakan inflasi. Untuk itu, seharusnya Bank Sentral tidak menetapkan sasaran lain dan berfokus pada sasaran utama pengendalian inflasi.

Dalam penelitian ini akan ditelaah lebih lanjut apakah penerapan ITF selama 17 bulan terakhir, sejak awal penerapannya, yaitu Juli 2005, sudah mencapai apa yang diharapkan oleh Bank Indonesia sebagai strategi yang tepat bagi kebijakan moneternya saat ini dan masa yang akan datang. Apakah memang ITF merupakan pilihan yang tepat sebagai sandaran kebijakan moneter Indonesia untuk sekarang dan seterusnya? Untuk itu, dalam upaya penarikan kesimpulan yang lebih obyektif, agar

Jurnal Manajemen Teknologi

4) Website Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/Data+Statistik

Evaluasi Satu Tahun Penerapan Kebijakan Moneter Berdasarkan Inflation Targeting di Indonesia

dapat mencapai tujuan penelitian, yaitu memberikan penilaian atas efektifitas penerapan *inflation* targeting di Indonesia sebagai kebijakan moneter Bank Indonesia, kami menitikberatkan pada metodologi penelitian yang menggunakan kombinasi data dan analisis secara kuantitatif dan kualitatif sehingga akan mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat, tepat dan bermanfaat.

#### 3. Tinjauan Teoritis

#### 3.1. Inflation Targeting

Inflation Targeting merupakan salah satu bentuk kebijakan moneter yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya pemulihan kondisi ekonomi nasional. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku bank sentral menetapkan target laju inflasi untuk periode jangka waktu tertentu. Dengan demikian, kebijakan ITF lebih berorientasi ke depan (forward looking) dibanding kebijakan-kebijakan moneter sebelumnya (yang lazim disebut juga sebagai kebijakan konvensional). Tidak seperti halnya kebijakan moneter konvensional yang senantiasa mempergunakan target antara besaran moneter, dalam ITF dipergunakan proyeksi inflasi sebagai target. Kalaupun harus mempergunakan target antara, biasanya akan digunakan tingkat bunga jangka pendek

Inflasi sebagai sasaran utama dan independensi bank sentral sebagai pengendali inflasi merupakan landasan dari ITF. Konsep ITF ini merupakan produk dari evolusi teori moneter dan akumulasi pengalaman empiris. Teori-teori moneter yang memberikan kontribusi bagi pematangan konsep ini meliputi teori klasik hingga teori modern, antara lain (5):

# a. Teori Klasik >< Teori Keynes.

Menurut teori Klasik, kebijakan moneter tidak berpengaruh terhadap sektor riil. Sedangkan menurut teori Keynes, sektor moneter dan sektor riil saling terkait melalui suku bunga. Berdasarkan perkembangan teori dan pengalaman empirik, disimpulkan bahwa dalam jangka panjang teori yang sesuai untuk dipergunakan adalah teori Klasik, sedangkan dalam jangka pendek teori Keynes lebih tepat. Kebijakan moneter hanya mempunyai dampak permanen pada tingkat inflasi. Dengan kata lain, pembenahan sektor ekonomi dapat dilakukan dengan cara pengendalian inflasi.

## b. Teori Klasik Modern >< Teori Keynes.

Salah satu penganut teori Klasik Modern, Milton Friedman, mengemukakan bahwa kebijakan rule lebih baik dibanding discretion. Pendapat tersebut bertolak belakang dengan teori Keynes. Kemudian, untuk menentukan pilihan atas *rule vs discretion*, ITF menawarkan suatu framework yang mengkombinasikan keduanya secara sistematis, yang disebut dengan constrained discretion. Karena pada dasarnya, dalam praktik kebijakan moneter tidak ada yang murni rules ataupun murni discretion.

# c. Teori Kuantitas >< Teori Keynes.

Teori Keynes mempergunakan tingkat bunga sebagai sasaran antara, sedangkan dalam teori kuantitas digunakan jumlah uang beredar. Penggunaan sasaran antara, baik berupa tingkat bunga maupun kuantitas uang, akan menyebabkan pembatasan diri terhadap informasi. Guna menghindarkan polemik ini, kebijakan *ITF* menentukan inflasi sebagai sasaran akhir. Dengan

5) Boediono. 2000. "Inflation Targeting". Makalah Seminar Sehari Kerjasama FE UGM dengan BI, MM UGM, 29 September.

demikian *ITF* menggunakan mekanisme transmisi yang relevan, tidak harus tingkat bunga ataupun kuantitas uang. Dengan mengambil inflasi sebagai sasaran akhir, otoritas moneter dapat lebih bebas dan lebih fleksibel dalam menggunakan semua data dan informasi yang tersedia untuk mencapai sasaran, karena inflasi dipengaruhi bukan hanya oleh satu faktor.

#### d. Teori Rational Expectations.

Teori Rational Expectations menyebutkan bahwa faktor ekspektasi mempunyai peran penting, karena mempengaruhi perilaku dan reaksi para pelaku ekonomi terhadap suatu kebijakan. Kebijakan moneter hanya dapat mempengaruhi output dalam jangka pendek, karena setelah ekspektasi masyarakat berperan, output akan kembali seperti semula. Ekspektasi masyarakat inilah yang menjadi kunci keberhasilan yang harus dapat dikendalikan. Dengan penerapan ITF dalam kebijakan moneter, diharapkan dapat menjadi anchor bagi ekspektasi masyarakat.

#### e. Teori Moneter Modern.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori moneter modern memasukkan aspek kredibilitas yang bersumber dari masalah *time inconsistency*. Artinya bahwa inkonsistensi dalam kebijakan moneter dapat terjadi apabila otoritas moneter terpaksa harus mengorbankan sasaran jangka panjang demi mencapai sasaran lain dalam jangka pendek. Agar hal ini tidak terjadi, maka pengendalian inflasi harus menjadi sasaran tunggal, atau setidaknya menjadi sasaran utama. Menetapkan inflasi sebagai sasaran utama berarti menghindarkan diri dari inkonsistensi kebijakan.

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kebijakan moneter dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaannya. Prasyarat tersebut meliputi:

- 1. Independensi Bank Sentral.
- 2. Fokus terhadap sasaran.
- 3. Capacity to forecast inflation.
- 4. Pengawasan instrumen.
- 5. Pelaksanaan secara konsisten dan transparan.
- 6. Fleksibel sekaligus kredibel.

# 3.2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data. Secara visual, deskripsi atau penggambaran sekumpulan data dapat dilakukan dalam dua bagian:

- a. Deskripsi dalam bentuk tulisan atau teks. Tulisan terdiri dari bagian-bagian yang penting yang menggambarkan isi data secara keseluruhan, seperti mean (rata-rata) data, standar deviasi (bagaimana data bervariasi dalam kelompoknya), varians data dan sebagainya.
- b. Deskripsi dalam bentuk gambar/grafik. Grafik sebuah data biasanya disajikan untuk melengkapi deskripsi berupa teks agar dapat lebih impresif dan komunikatif dengan para penggunanya.

## 3.3. Statistik Inferensi

Jika dalam statistik deskriptif dilakukan deskripsi pada data, maka dalam statistik inferensi, pada data dilakukan analisis yang mengarah ke sebuah pengambilan keputusan. Walaupun variasi atau biasa disebut rumus statistik (inferensi) sangat banyak, pada umumnya statistik inferensi mempunyai

182 Jurnal Manajemen Teknologi

Evaluasi Satu Tahun Penerapan Kebijakan Moneter Berdasarkan Inflation Targeting di Indonesia

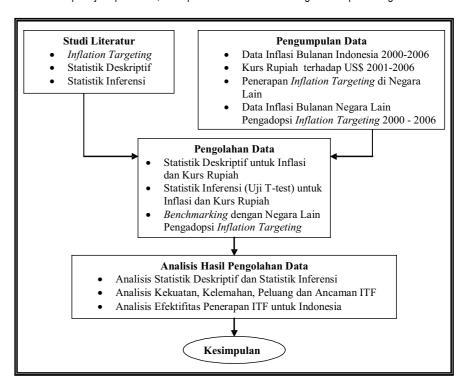
tahapan secara umum sebagai berikut (6):

- a. Menentukan H0 dan H1. Hal ini berkaitan dengan masalah penelitian yang kemudian dirinci dalam berbagai hipotesis yang akan diuji.
- b. Menentukan statistik hitung dan statistik tabel. Untuk menguji Hipotesis, pada umumnya kita akan membandingkan statistik hitung dengan statistik tabel, atau dapat juga dilihat pada tingkat signifikansinya.
- c. Mengambil keputusan sesuai dengan hasil (statistik hitung dan tabel) yang ada.

Sama halnya dengan statistik deskriptif yang memperhatikan tipe data, berbagai metode pada statistik inferensi juga memperhatikan hal tersebut. Selain itu, pembagian statistik inferensi juga memperhatikan jumlah variabel yang dianalisis, serta apakah ada hubungan antar variabel. Jika dua sampel berhubungan satu dengan lainnya (dependent) maka disebut sebagai ANALISIS SAMPEL DEPENDEN. Termasuk pada analisis ini adalah uji t-paired, uji Mean Whitney dan sebagainya. Uji t-paired berfungsi untuk menguji dua sampel yang berpasangan, apakah mempunyai rata-rata yang secara nyata berbeda ataukah tidak. Sampel berpasangan (paired sample) adalah sebuah sampel dengan subyek yang sama namun mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda.

#### 4. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka penelitian ini dilakukan mengikuti tahapan sebagai berikut:



Gambar 3. Bagan Alir Penelitian dan Penulisan Makalah

6) Evans, James R. and David L. Olson (2003). Statistics, Data Analysis, and Decision Modelling. Prentice Hall.

Jurnal Manajemen Teknologi

183

#### 5. Hasil Penelitian

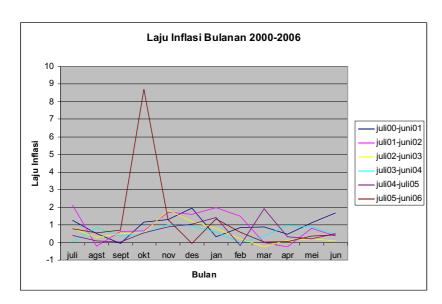
# 5.1. Hasil Statistik Deskriptif untuk Laju Inflasi

Tabel 4 memperlihatkan rata-rata dari 12 bulan yang dianalisis dengan output kedua kelompok inflasi sebelum (Juli 2000 Juni 2005) dan sesudah penerapan Inflation Targeting (Juli 2005 Juni 2006) untuk data dengan sumber yang sama. Sebagian besar data menunjukkan bahwa penerapan ITF lebih dari 1 tahun belakangan ini belum menunjukkan adanya perubahan yang mengarah pada penurunan laju inflasi bulanan. Hal ini terjadi karena laju inflasi masih dominan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dalam penetapan harga seperti BBM, listrik, dan telepon. Pada bulan Oktober 2005 terjadi kenaikan inflasi yang sangat tinggi karena kenaikan harga BBM.

Tabel 1 Output Statistik Deskriptif Data Inflasi Tahun 2000 - 2006

Data Inflasi	Mean
Inflasi Juli00-Juni01	0.9583
Inflasi Juli01-Juni02	0.9124
Inflasi Juli02-Juni03	0.5375
Inflasi Juli03-Juni04	0.5808
Inflasi Juli04-Juni05	0.6008
Inflasi Juli05-Juni06	1.2358

Secara grafik, pergerakan laju inflasi dari Juli 2000 hingga Juni 2006 dapat terlihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 4. Grafik Laju Inflasi Juli 2000-Juni 2006

Dari Gambar 4 dapat dilihat bahwa laju inflasi setelah diterapkannya inflation targeting secara umum lebih rendah daripada sebelum diterapkannya inflation targeting, kecuali pada bulan Oktober 2005 dimana pemerintah menaikkan harga BBM.

Jurnal Manajemen Teknologi

Evaluasi Satu Tahun Penerapan Kebijakan Moneter Berdasarkan Inflation Targeting di Indonesia

# 5.2. Hasil Statistik Inferensi (Paired SampleT-Test) untuk Laju Inflasi

Untuk melihat apakah Inflation Targeting telah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengendalian inflasi maka akan dilakukan Paired Sample T-Test atau uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Tes ini dilakukan karena sebuah sampel dengan subyek yang sama, yaitu inflasi bulanan mengalami dua perlakuan atau pengukuran yang berbeda, yaitu sebelum dan sesudah diterapkannya Inflation Targeting. Dengan melakukan pengujian t-paired diharapkan akan diketahui apakah terdapat perbedaan antara laju inflasi bulanan sebelum dengan sesudah pengadopsian ITF. Pengujian t-paired dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai berikut:

- Data dianggap berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau mendekati normal.
- I Kedua data adalah *dependent* atau berpasangan. Disebut demikian karena pada obyek yang sama diberi dua perlakuan yang berbeda yaitu sebelum dan sesudah Inflation Targeting diterapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam tabel berikut terlihat data inflasi bulanan yang akan dilakukan pengujian (Paired Sample T-Test) menggunakan software SPSS.

Tabel 2. Inflasi Bulanan Indonesia 2000-2006 (7)

Tahun	Inflasi Bulanan											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des
2000	1.32	0.07	0.45	0.56	0.84	0.5	1.28	0.51	-0.06	1.16	1.32	1.94
2001	0.33	0.87	0.89	0.46	1.13	1.67	2.12	-0.21	0.64	0.68	1.71	1.62
2002	1.99	1.5	-0.02	-0.24	0.8	0.36	0.82	0.29	0.53	0.54	1.85	1.20
2003	0.8	0.2	-0.23	0.15	0.21	0.09	0.03	0.84	0.36	0.55	1.01	0.94
2004	0.57	-0.02	0.36	0.97	0.88	0.48	0.39	0.09	0.02	0.56	0.89	1.04
2005	1.43	-0.17	1.91	0.34	0.21	0.5	0.78	0.55	0.69	8.70	1.31	-0.04
2006	1.36	0.58	0.03	0.05	0.37	0.45	0.45	0.33	0.38	0.86	0.34	

Selanjutnya akan ditampilkan pengambilan keputusan dan analisis berdasarkan output SPSS yang diperoleh.

# 1. Hipotesis untuk kasus ini:

Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata populasi inflasi bulanan sebelum dengan sesudah penerapan Inflation Targeting adalah sama/tidak berbeda secara nyata). Atau dapat dikatakan kebijakan moneter dengan ITF tidak efektif untuk dijadikan sebagai sasaran kebijakan moneter Indonesia

H1: D≠0

Kedua rata-rata populasi tidak identik (rata-rata populasi inflasi bulanan sebelum dan sesudah penerapan Inflation Targeting adalah berbeda secara nyata). Atau dapat dikatakan kebijakan moneter dengan ITF dapat dipertimbangkan untuk diterapkan lebih lanjut di Indonesia sebagai sasaran akhir kebijakan moneter BI.

# 2. Pengambilan Keputusan.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi

- Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima
- ☐ Jika signifikansi < 0,05, maka H0 ditolak

#### 3. Keputusan:

Output Paired Sample T-Test laju inflasi dapat ditampilkan pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Signifikansi Inflasi Data Berpasangan Tahun 2000-2006

Data Inflasi	Sig. (2-tailed)
Inflasi Juli 2000 – Juni 2001 <b>Vs.</b> Juli 2005 – Juni 2006	0.7
Inflasi Juli 2001 – Juni 2002 <b>Vs.</b> Juli 2005 – Juni 2006	0.665
Inflasi Juli 2002 – Juni 2003 <b>Vs.</b> Juli 2005 – Juni 2006	0.335
Inflasi Juli 2003 – Juni 2004 <b>Vs</b> . Juli 2005 – Juni 2006	0.372
Inflasi Juli 2004 – Juni 2005 <b>Vs.</b> Juli 2005 – Juni 2006	0.395

Terlihat bahwa probabilitas (*Sig. 2 tailed*) tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 & 2005 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, yaitu rata-rata inflasi bulanan sebelum dan sesudah *ITF* adalah tidak berbeda secara signifikan.

# 5.3. Hasil Statistik Deskriptif untuk Nilai Tukar Rupiah

Tabel 4 memperlihatkan 244 data yang dianalisis dengan output kedua kelompok kurs rupiah sebelum (Juli 2001 Juni 2005) dan sesudah penerapan ITF (Juli 2005 Juni 2006) untuk data dengan sumber yang sama. Secara umum *inflation targeting* belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah setelah penerapan ITF (Juli 2005 2006) berkisar pada angka Rp 9.100,00 per US\$, lebih buruk daripada nilai tukar rupiah Juli 2002 Juni 2005.

Tabel 4 Statistik Deskriptif Data Nilai Tukar Rupiah Tahun 2001 - 2006

Data Nilai Tukar Rupiah per 1 US\$	Mean
Nilai Tukar Rupiah Juli01-Juni02	9284.2459
Nilai Tukar Rupiah Juli02-Juni03	8353.3730
Nilai Tukar Rupiah Juli03-Juni04	8087.3115
Nilai Tukar Rupiah Juli04-Juni05	8778.4672
Nilai Tukar Rupiah Juli05-Juni06	9100.7131

# 5.4. Hasil Statistik Inferensi (Paired Sample T- Test) untuk Nilai Tukar Rupiah

Jurnal Manajemen Teknologi

Perhitungan statistik inferensi untuk nilai tukar rupiah adalah

1. Hipotesis untuk kasus ini:

H0: D=0

Kedua rata-rata populasi adalah identik (rata-rata kurs rupiah sebelum dengan sesudah penerapan *ITF* adalah sama/tidak berbeda secara nyata).

Evaluasi Satu Tahun Penerapan Kebijakan Moneter Berdasarkan Inflation Targeting di Indonesia

#### H1: D≠0

Kedua rata-rata populasi tidak identik (rata-rata nilai kurs rupiah sebelum dan sesudah penerapan *ITF* adalah berbeda secara nyata). Atau dapat dikatakan kebijakan moneter dengan *ITF* dapat dipertimbangkan untuk diterapkan lebih lanjut di Indonesia sebagai sasaran akhir kebijakan moneter BI.

#### 2. Pengambilan Keputusan.

Dasar pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi:

- Jika signifikansi > 0,05, maka H0 diterima

#### Keputusan

Output Paired Sample T-Test laju inflasi dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5. Signifikansi Nilai Tukar Rupiah Data Berpasangan Tahun 2001-2006

Data Nilai Tukar Rupiah	Sig. (2-tailed)
Kurs Rupiah Juli 2001 – Juni 2002 <b>Vs.</b> Juli 2005 – Juni 2006	0.000
Kurs Rupiah Juli 2002 – Juni 2003 <b>Vs.</b> Juli 2005 – Juni 2006	0,000
Kurs Rupiah Juli 2003 – Juni 2004 Vs. Juli 2005 – Juni 2006	0,000
Kurs Rupiah Juli 2004 – Juni 2005 <b>Vs.</b> Juli 2005 – Juni 2006	0,000

Semua rata-rata kurs rupiah tahun 2001, 2002, 2003, dan 2004 memiliki perbedaan yang nyata dengan rata-rata kurs rupiah tahun 2005 yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas (*Sig. 2 tailed*) 0.00, lebih kecil dari 0,05. Sebagian besar data menunjukkan bahwa setelah penerapan *ITF*, nilai kurs rupiah masih berfluktuasi di sekitar angka Rp 8000-Rp 10.000. Sebagian besar data menunjukkan bahwa setelah penerapan *ITF*, nilai kurs rupiah mengarah ke angka kisaran di bawah Rp 9000 dimana angka ini sesuai dengan sasaran nilai tukar rupiah BI.

# 5.5. Hasil Benchmarking dengan Negara Lain Pengadopsi Inflation Targeting

Tabel 6 (halaman berikut) menunjukkan laju inflasi negara-negara yang telah menerapkan ITF.

Dari Tabel 6 terlihat bahwa hampir semua negara yang telah menerapkan ITF mampu mencetak inflation rate tahunan di bawah 5%. BI tentunya berharap akan dapat mencapai keberhasilan yang sama dengan menerapkan ITF sebagai kebijakan moneternya. Jika ditinjau dari keberhasilan Negaranegara yang telah menerapkan ITF sebagai kebijakan moneter bank sentral maka sudah sepatutnya untuk dapat diterapkan juga di Indonesia oleh BI agar mampu menciptakan fundamental ekonomi makro yang lebih kuat. Karena adanya kesamaan permasalahan dan latar belakang, maka diharapkan pelaksanaan target inflasi di negara kita juga akan dapat menuai keberhasilan.

Tabel 6. Laju Inflasi Tahunan (2000-2006) Negara-Negara yang Menerapkan Inflation Targeting (8)

Negara	Bulan	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Inggris	Mar	2.1	2.6	2.3	1.3	3.1	1.1	1.9	2
	Jun	1.3	3.3	1.9	1	2.9	1.6	2	2.5
	Sept	1.1	3.3	1.7	1.7	2.8	1.1	2.5	
	Dec	1.8	2.9	0.7	2.9	1.3	1.6	2	
Kanada	Mar	1	3	2.5	1.8	4.3	0.7	2.3	2.2
	Jun	1.6	2.9	3.3	1.3	2.6	2.5	1.7	2.5
	Sept	2.6	2.7	2.6	2.3	2.2	1.8	3.4	
	Dec	2.6	3.2	0.7	3.9	2	2.1	2.2	
Korsel	Mar	0.5	1	4.4	2.3	4.5	3.1	3.1	2
	Jun	0.6	2.2	5.2	2.6	3	3.6	2.5	2.6
	Sept	0.8	3.9	3.2	3.1	3.3	3.9	2.7	
	Dec	1.4	3.2	3.2	3.7	3.4	3	2.6	
Filipina	Mar	8.7	3.3	6.7	0.6	2.9	3.8	8.5	7.6
	Jun	5.8	3.9	6.7	3	3.4	5.1	7.1	6.7
	Sept	5.7	4.6	6.1	2.9	2.9	6.9	7	
	Dec	4.3	6.6	3.9	2.6	3.1	7.9	6.6	
Thailand	Mar	1.6	1.1	1.4	3.6	1.7	2.3	3.2	5.6
	Jun	-1.2	2	2.3	0.2	1.7	3	5.3	5.89
	Sept	-0.8	2.3	1.4	0.4	1.7	3.6	6.2	
	Dec	0.7	1.3	0.8	1.6	1.8	2.9	5.8	

# 5.6. Analisis Kualitatif: Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan yang dimiliki Indonesia untuk menerapkan *Inflation Targeting*

#### Kekuatan

- a. Dalam dua dekade silam peranan bank sentral telah berubah secara signifikan dalam mengambil setiap kebijakan moneter.
- b. Dengan mengumumkan secara eksplisit dan terbuka, bank sentral "dipaksa" menjalankan dan mencapai target tersebut.

#### Kelemahan

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat. Meskipun inflasi sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat maupun negara, namun tidak setiap orang memahami arti pentingnya inflasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak setiap orang memahami faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi dan bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi terhadap kenaikan hargaharga. Selain itu, tidak setiap orang memahami dampak inflasi terhadap kehidupan mereka sehari-hari.
- b. Ketidakstabilan keuangan global sudah berdampak negatif bagi stabilitas keuangan dalam negeri masing-masing negara berkembang, termasuk Indonesia.

Jurnal Manajemen Teknologi

8) Website Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/Data+Statistik

Evaluasi Satu Tahun Penerapan Kebijakan Moneter Berdasarkan Inflation Targeting di Indonesia

#### Peluang

- a. ITF dipercaya sebagai solusi tepat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sejak terjadinya krisis ekonomi 1998.
- b. Lebih dari 24 negara Asia, termasuk Thailand, Korea, Filipina, dan Indonesia telah mengadopsi ITF guna memulihkan kembali kepercayaan publik sejak krisis moneter terjadi

#### Ancaman

Ancaman yang dihadapi oleh Indonesia berdasarkan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai penentu keberhasilan pelaksanaan *Inflation Targeting* adalah:

- 1. Ancaman karena kesulitan dalam menciptakan independensi Walaupun pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang tentang Independensi Bank Sentral, independensi bank sentral yang absolut masih sulit untuk diciptakan karena hingga saat ini sistem pemerintahan Indonesia tidak memungkinkan untuk memberikan kewenangan penuh terhadap suatu lembaga/otoritas dalam menjalankan fungsi pengawasan instrumen keuangan. Untuk saat ini, pemerintah masih saja ikut mengambil bagian dan belum dapat dipastikan tidak turun campur tangan dalam urusan lembaga pengawas, meski lembaga tersebut disebut lembaga independen. Akibat sistem penggajian yang masih berasal dari pemerintah maka para pejabat tersebut memiliki loyalitas yang teramat tinggi kepada pemerintah sehingga menyebabkan berbagai fungsi pengawasan tak dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- 2. Ancaman karena kesulitan dalam memprediksi inflasi. Berkaitan dengan kondisi politik dan keamanan yang boleh dikatakan masih tidak menentu akhirakhir ini, peramalan inflasi di Indonesia masih sulit dilaksanakan. Padahal, kemampuan untuk memprediksi inflasi merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kebijakan target inflasi. Selain juga kesulitan ini diakibatkan oleh ekspektasi inflasi masyarakat yang masih tinggi dan belum dapat dipahami perilakunya. Di sisi lain, stabilitas nasional sangat berperan dalam menentukan kondisi ekonomi suatu negara. Para investor masih beranggapan bahwa Indonesia belum cukup kondusif bagi investasi. Jika stabilitas belum tercapai, maka kemampuan memprediksi inflasi dengan cermat akan sangat sulit dilakukan.
- 3. Ancaman karena sulitnya mewujudkan kebijakan secara konsisten dan transparan.
  Akibat tingginya tingkat korupsi serta maraknya praktek moral yang buruk oleh oknum-oknum pemerintahan, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan sulit diraih. Masyarakat kian apatis dan merasa enggan untuk secara sukarela berpartisipasi dan turut mengambil bagian dalam pelaksanaan pemulihan krisis ekonomi. Mengingat hal tersebut, kebijakan BI untuk menerapkan Inflation Targeting belum tentu mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat, kecuali apabila BI serta lembaga pelaksana kebijakan ini dapat meyakinkan masyarakat bahwa segenap aparatur dan jajarannya bersih dan bebas korupsi, kebijakan target inflasi secara konsisten dan transparan juga akan sulit terwujud.
- 4. Ancaman karena sulitnya mewujudkan kebijakan secara fleksibel dan kredibel.
  Berbagai pelaksanaan kebijakan di Indonesia tampaknya hanya merupakan fenomena trade-off.
  Dengan kata lain, jika kebijakan diberlakukan secara lentur, maka akan membuka kesempatan korupsi dan kolusi, sehingga menyebabkan incredible. Demikian juga sebaliknya, apabila kebijakan

ini lebih berfokus pada kredibilitas, maka akan timbul sifat *inflexible*. Untuk itu, menjalankan kebijakan secara fleksibel sekaligus kredibel bukanlah pekerjaan yang mudah.

# 5. Ancaman karena tingkat keparahan krisis yang tinggi.

Krisis ekonomi yang menghantam Indonesia sangatlah berat dan dapat dikatakan tergolong akut. Penanganan krisis ekonomi di Indonesia lebih sulit dibandingkan dengan negara-negara lainnya yang turut terimbas. Dapat dikatakan tingkat keparahan krisis ekonomi di Indonesia jauh lebih tinggi daripada negara lain sehingga penyelesaiannya pun membutuhkan usaha yang ekstra dan tepat. Kebijakan ITF yang telah berhasil diberlakukan di negara-negara lain masih menyimpan kemungkinan tidak sesuai untuk diberlakukan di Indonesia.

# 5.7. Analisis Efektifitas Penerapan ITF untuk Indonesia

Sejak penerapan Inflation Targeting Framework bulan Juli 2005 lalu serta dari hasil pengolahan data kuantitatif yang membandingkan data inflasi bulanan tahun 2005-2006 dengan data inflasi tahun-tahun sebelumnya belum terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Begitupun juga yang ditunjukkan oleh indikator ekonomi lainnya yang diteliti dalam makalah ini, yaitu nilai tukar rupiah, walaupun memberikan hasil yang menunjukkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara sebelum dengan setelah Indonesia menerapkan ITF namun perbedaan itu belum menunjukkan kecenderungan pergerakan nilai tukar rupiah yang semakin membaik serta belum mendekati sasaran nilai tukar Bank Indonesia atas rupiah terhadap USD yaitu stabil di kisaran Rp 8.500. Pergerakan nilai tukar rupiah masih berfluktuatif di kisaran angka Rp 8.000 hingga Rp 10.000. Pertumbuhan ekonomi cenderung menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, yaitu mendekati sasaran pemerintah sebesar 5% dalam 1 tahun terakhir sejak penerapan IT. Sedangkan tingkat pengangguran dan tingkat investasi yang juga dapat dipakai sebagai bahan penilaian keefektifan penerapan ITF belum dapat digunakan sebagai bahan penelitian karena data mengenai kedua indikator ekonomi tersebut belum dapat diakses. Namun hal ini masih dapat dipandang sebagai sesuatu yang wajar dan belum seharusnya menimbulkan sinyal kuning bagi Bank Indonesia karena umur penerapan ITF di Indonesia masih terhitung sangat muda. Gambar 5 berikut menggambarkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak tahun 1999 hingga 2006.



Gambar 5. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1999-2006 (9)

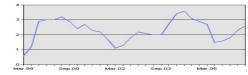
Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan konsisten peningkatannya adalah salah satu indikator makro ekonomi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi keberhasilan penerapan sebuah kebijakan moneter. Gambar 6 di bawah ini menampilkan pertumbuhan ekonomi beberapa negara yang telah mengadopsi *inflation targeting*, seperti Inggris, Kanada, Korea Selatan, Thailand dan Filipina.

Jurnal Manajemen Teknologi

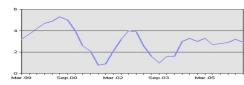
9) Website Bank Indonesia, http://www.bi.go.id/web/id/Data+Statistik

Evaluasi Satu Tahun Penerapan Kebijakan Moneter Berdasarkan Inflation Targeting di Indonesia

#### Inggris



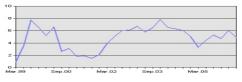
#### Kanada



#### Korea Selatan



#### Thailand



# Filipina



Gambar 6. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Negara yang Telah Mengadopsi Inflation Targeting

Ditinjau dari analisis kualitatif, Bank Indonesia masih akan menghadapi banyak hambatan dan kendala sebagai ancaman untuk penerapan *ITF* yang sukses di masa depan. Kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman yang menyertai pelaksanaan *IT* di Indonesia harus diperhatikan secara kontinu, seksama dan cermat oleh semua pihak, tidak terkecuali oleh masyarakat Indonesia yang masih belum memahami makna inflasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Meskipun telah diutarakan sebelumnya bahwa tingkat keparahan krisis yang dialami oleh Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga mengalami krisis yang serupa, tidak tertutup kemungkinan keberhasilan penerapan *Inflation Targeting* masih terbuka bagi Indonesia.

# 6. Kesimpulan

Penerapan *ITF* untuk saat ini menurut kami belum cukup memberikan kontribusi yang signifikan, namun patut untuk dicoba mengingat setelah sekian lama berbagai kebijakan moneter BI dalam pengendalian inflasi selalu menemui gap yang cukup besar antara sasaran inflasi dengan realisasi inflasi. Selain itu tidak dapat dipungkiri keberhasilan negara lain akan dapat mengiringi harapan Indonesia untuk menuai keberhasilan yang sama di masa depan. Tentunya dalam mengadopsi kebijakan ini harus memperhatikan prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar penerapan *ITF* tidak berbalik menjadi bumerang bagi BI karena nilai kredibilitas yang dipertaruhkan sangatlah tinggi.

# 7. Saran

Indikator lain yang dapat dipakai untuk melihat keberhasilan penerapan *ITF* adalah pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten, yaitu di kisaran 5%, dimana angka ini sesuai dengan sasaran pertumbuhan ekonomi pemerintah dan Bank Indonesia. Sebaiknya untuk menilai efektivitas penerapan *ITF* sebagai kebijakan moneter di Indonesia masih harus menunggu data-data indikator makro ekonomi lainnya seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan tingkat investasi setelah paling tidak lima tahun lamanya *ITF* diterapkan. Dari situ akan diperoleh hasil analisa sebagai bahan pengambilan kesimpulan dan keputusan yang lebih tepat, akurat serta obyektif.